

KINERJA KEPEMIMPINAN BUPATI SRI SUMARNI DI KABUPATEN GROBOGAN PERIODE 2016-2021 DALAM MENINGKATKAN ANGKA HARAPAN HIDUP

Asa Sabila Rahmadani
Email : Asasabila2299@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M.Si.
Email : sulistyowati9mei@gmail.com

Departemen Politik dan Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro, Jawa Tengah
Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari data bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan yang terus meningkat setiap tahunnya. Bahkan, Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan melebihi rata-rata Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Jawa Tengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Bupati Grobogan periode 2016-2021 Sri Sumarni dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan. Untuk mengetahui kinerja Bupati Sri Sumarni, penelitian ini menggunakan teori Pengarusutamaan Gender. Dalam proses penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender, penelitian ini akan lebih memfokuskan diri kepada dua hal dari proses Pengarusutamaan Gender yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan belanja daerah.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Grobogan, Kepala BAPPEDA Grobogan, dan Kepala Dinas DP3AKB Grobogan. Analisis dan Interpretasi Data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa tidak ada kebijakan baru yang dibuat oleh Bupati Sri Sumarni. Namun, dengan menjadikan kesehatan sebagai program utama, serta membuat program-program yang menasar kepada kelompok perempuan, menjadi kunci keberhasilan Bupati Sri Sumarni dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga memperlihatkan bahwa kepala daerah yang memiliki perspektif kesetaraan gender, serta mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender dengan baik, berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup. Oleh karena itu, penting bagi kepala daerah untuk mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender dalam setiap kebijakan.

Kata Kunci: Angka Harapan Hidup, Kabupaten Grobogan, Sri Sumarni.

**THE LEADERSHIP PERFORMANCE OF THE REGENT SRI SUMARNI INI
GROBOGAN REGENCY FOR THE PERIOD 2016- 2021 IN INCREASING LIFE
EXPECTANCY**

Asa Sabila Rahmadani

Email : Asasabila2299@gmail.com

Dra. Sulistyowati, M.Si.

Email : sulistyowati9mei@gmail.com

Departement of Politics and Government

Faculty of Social and Political Science, DiponegoroUniversity, Central Java.

Website : <https://fisip.undip.com/> - Email : fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

This research departs from the data that the Life Expectancy (AHH) in Grobogan Regency continues to increase every year. In fact, the Life Expectancy (AHH) in Grobogan Regency exceeds the average Life Expectancy (AHH) in Central Java Province. Therefore, this study aims to determine how the performance of the Regent of Grobogan for the period 2016-2021 Sri Sumarni in increasing the Life Expectancy (AHH) in Grobogan Regency. To determine the performance of the Regent Sri Sumarni, this study uses the theory of Gender Mainstreaming. In the process of implementing Gender Mainstreaming, this research will focus more on two things from the Gender Mainstreaming process, namely policies issued by regional heads and regional expenditures.

This research was conducted using descriptive qualitative method. Data collection techniques by conducting interviews and documentation. The resource persons in this study were the Regent of Grobogan, the Regional Secretary of Grobogan, the Head of BAPPEDA Grobogan, and the Head of the Grobogan DP3AKB. Analysis and Interpretation of the data used are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study show that there are no new policies made by the Regent Sri Sumarni. However, making health as the main program, as well as making programs that target women's groups, is the key to the success of the Regent Sri Sumarni in increasing life expectancy. In addition, the results of this study also show that regional heads who have a gender equality perspective, and apply Gender Mainstreaming well, have succeeded in increasing life expectancy. Therefore, it is important for regional heads to optimize Gender Mainstreaming in every policy.

Keywords: *Life Expectancy, Grobogan Regency, Sri Sumarni.*

A. PENDAHULUAN

Keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah dimaksudkan untuk menjatuhkan, menurunkan, atau merebut kekuasaan dari laki-laki, melainkan dimaksudkan agar bisa menjadi mitra sejajar laki-laki. Sebagai upaya meningkatkan partisipasi politik perempuan, penting untuk membahas isu keterlibatan perempuan. Kelompok feminis percaya bahwa tidak mungkin laki-laki membawa kepentingan bagi perempuan, karena perempuan dan laki-laki memiliki kepentingan serta pandangan yang berbeda.¹

Terdapat beberapa alasan terkait pentingnya perempuan berpartisipasi dalam politik. Pertama, alasan keadilan dan kesetaraan. Mengingat perempuan berjumlah hampir 50% lebih dari populasi dunia, sehingga penting untuk perempuan memiliki keterwakilan yang sama dengan laki-laki. Kedua, alasan kepentingan perempuan. Hal ini berangkat dari pemahaman yang salah dari kebanyakan masyarakat secara umum bahwa perempuan hanya melakukan kegiatan dalam ranah privat, sedangkan urusan publik menjadi tanggung jawab laki - laki. Akibatnya, mayoritas kebijakan publik yang berdampak pada perempuan biasanya dibuat oleh laki-

laki. Alasan ketiga yang tidak kalah penting adalah "emansipasi", yang merupakan tuntutan sejarah bagi perkembangan dan kemajuan negara, masyarakat dan bangsa, dan juga syarat transisi perubahan ke arah yang lebih demokratis melalui partisipasi perempuan.² Keterlibatan perempuan dalam politik dapat terlihat dari beberapa tokoh perempuan dunia yang mampu menjadi pemimpin, seperti Indira Gandhi di India, Cory Aquino di Filipina, dan Margareth Teacher di Inggris.³ Di Indonesia, perjuangan sosok R.A. dapat dirasakan dengan adanya gerakan emansipasi wanita. Kini, posisi perempuan sebagai pemimpin sudah mulai dihargai dan diperlakukan setara. Sejalan dengan gerakan pembebasan dan gerakan kesetaraan gender yang intinya menuntut persamaan hak perempuan di segala bidang kehidupan, persepsi tentang citra perempuan berangsur-angsur berubah. Dalam sejarah Indonesia, Megawati Soekarno Putri berhasil menjadi salah satu pemimpin Indonesia. Ini jelas menunjukkan

¹ Philips, Anne. (1991). *Engendering Democracy*. Cambridge : Polity Press. Hlm.63.

² Pratama, Youngky Andre., Iwan Rachmat Soetijono, dan Gautama Budi Arundhati.(2013). Hak-Hak Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Indonesia Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Universitas Jember. Hlm.2.

³ Yulianti, Reny., Dedy Dwi Putra, dan Paulus Diki Takanjanji. (2018). Women Leadership : Telaah Kapasitas Perempuan Sebagai Pemimpin. *Jurnal Politik dan Sosial Masyarakat, Vol.10, No.2*. Hlm.24.

bahwa perempuan mampu menjadi pemimpin, apalagi pimpinan sebuah negara.⁴

Hal ini menandakan bahwa partisipasi politik perempuan untuk menjadi seorang kepala daerah masih sangat rendah dan jauh. Secara tidak langsung, hal ini menggambarkan bahwa politik di tingkat lokal masih di dominasi oleh kaum laki – laki.

Sebagai pemimpin kepala daerah perempuan, Sri Sumarni sudah semestinya membawa kepentingan perempuan. Salah satu tolok ukur pemberdayaan perempuan adalah dengan melihat Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM adalah angka yang dipakai untuk melihat kemajuan pembangunan sumberdaya manusia di suatu wilayah. IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah dalam pembangunan manusia. IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).⁵ Indikator yang membentuk IPM terdiri dari tiga bidang yaitu kesehatan, pendidikan dan perekonomian.⁶

Perkembangan IPM di Kabupaten Grobogan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelum Ibu Sri Sumarni menjabat menunjukkan peningkatan. Akan tetapi, jika dibandingkan dengan IPM Jawa Tengah, IPM Kabupaten Grobogan masih berada di bawah IPM Provinsi Jawa Tengah.

Salah satu komponen IPM adalah kesehatan dengan indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup. AHH merupakan prediksi rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. Perkembangan AHH di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) Grobogan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelum Ibu Sri Sumarni menjabat menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Salah satu komponen IPM adalah kesehatan dengan indikatornya yaitu Angka Harapan Hidup. AHH merupakan prediksi rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan variabel penting untuk melihat taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Perkembangan AHH di Kabupaten Grobogan dalam kurun waktu 5 tahun (2010-2015) Grobogan di masa kepemimpinan kepala daerah sebelum Ibu

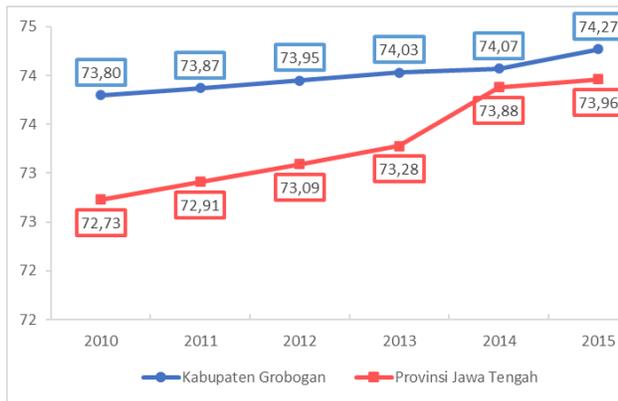
⁴ Sasmita, Jumiaty., dan Said As'ad Raihan. (2014). Kepemimpinan Pria dan Wanita, Towards a News Indonesia Business Architecture. Hlm.229.

⁵ Sari, Uni., Harianto, dan A Faroby Falatehan. (2016). Strategi Meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) Melalui Alokasi Anggaran Kesehatan di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, Vol. 8, No.1.Hlm,30.

⁶ Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, Bab II,Hlm.22.

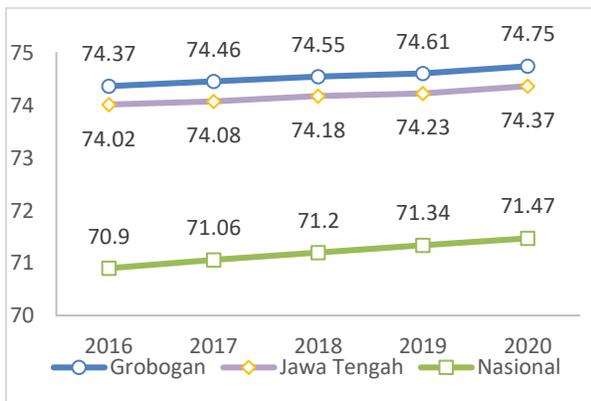
Sri Sumarni menjabat menunjukkan peningkatan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

Gambar 1
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Grobogan Tahun 2010 – 2015



Sumber : BPS Kabupaten Grobogan Tahun 2015.

Gambar 2
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2020



Sumber : BPS Nasional Tahun 2021.

Perkembangan Angka Harapan Hidup Kabupaten Grobogan saat Ibu Sri Sumarni menjabat mengalami peningkatan setiap tahun, yaitu pada tahun 2016 sebesar 74,37 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 74,75 tahun. Kondisi tersebut relevan terhadap peningkatan Angka Harapan Hidup Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

B. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kinerja Sri Sumarni sebagai pemimpin kepala daerah perempuan pertama di Grobogan dengan melihat kebijakan dan belanja daerah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup.

C. KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

1. Kepala Daerah

Pasal 3 ayat (2) UU tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kotamadya disebut walikota. Dalam melaksanakan pemerintahan di suatu daerah, pemimpin daerah tentunya memiliki hal-hal yang harus diperhatikan, bahkan menjadi prioritas dalam proses pelaksanaannya yaitu

tugas, wewenang dan kewajiban kepala daerah.

Menurut Pasal 25 Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang, sebagai berikut:

- a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. mengajukan rancangan Perda;
- c. menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- g. melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah

kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya mempunyai kewajiban yaitu:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundangundangan;
- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah;
- h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik;
- i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah;
- j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah;
- k. menyampaikan rencana strategis penyelenggaraan pemerintahan

daerah di hadapan Rapat Paripurna DPRD.

Dalam menjalankan otonomi daerah, kepala daerah harus mengemban tanggung jawab dan kewajiban lain dari kepala daerah. Berhasil tidaknya pencapaian tujuan organisasi juga tergantung pada kemampuan pemimpin daerah dalam membimbing, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Oleh karena itu, peran pemimpin dalam organisasi sangat penting, sehingga kepemimpinan disebut sebagai sarana untuk mencapai tujuan.

2. Konsep Gender Dan Jenis Kelamin

Robert Stoller adalah orang yang pertama kali menggunakan istilah “gender”. Hal ini dilakukan untuk membedakan pencirian manusia yang didasarkan pada sosial budaya ataupun berasal dari ciri-ciri fisik dan biologis.⁷ Selanjutnya, Ann Oakley menjelaskan bahwa gender sebagai konstruksi sosial atau atribut yang dikenakan pada manusia yang dibangun oleh kebudayaan manusia. Artinya, gender merupakan

behavioral differences (perbedaan perilaku) antara laki-laki dan perempuan yang dikonstruksi secara sosial, yaitu perbedaan yang bukan ketentuan Tuhan melainkan diciptakan oleh manusia melalui proses sosial dan kultural yang panjang.⁸

Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu: Gender tidak bersifat universal namun bervariasi dari masyarakat yang satu ke masyarakat yang lain dari waktu ke waktu. Sekalipun demikian, ada dua elemen gender yang bersifat universal, yaitu:⁹

1. Jenis kelamin tidak identik dengan gender
2. Gender merupakan dasar dari pembagian kerja di semua masyarakat.

Disimpulkan bahwa gender adalah suatu konstruksi atau bentuk sosial yang sebenarnya bukan bawaan lahir sehingga dapat dibentuk atau diubah tergantung dari tempat, waktu atau zaman, suku,

⁷ Nugroho, Riant D. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaan di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.2.

⁸ Ibid. Hlm.3.

⁹ Ibid. Hlm.6.

ras, atau bangsa, budaya, status sosial, pemahaman agama, ideologi negara, politik, hukum, dan ekonomi. Oleh karenanya, gender bukanlah kodrat Tuhan melainkan buatan manusia yang dapat dipertukarkan dan memiliki sifat relatif. Perbedaan gender dengan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1
Perbedaan Gender dan Jenis Kelamin

No.	Gender	Jenis Kelamin
1.	Buatan manusia	Ciptaan Tuhan
2.	Bukan kodrat	Merupakan suatu kodrat
3.	Dapat diubah	Tidak dapat diubah
4.	Dapat dipertukarkan	Tidak dapat dipertukarkan
5.	Tergantung pada waktu	Zaman
6.	Tergantung budaya setempat	Berlaku dimana saja

Penelitian ini melihat Sri Sumarni sebagai kepala daerah berdasarkan konsep gender, bukan

jenis kelamin. Selain itu, penelitian ini juga akan melihat bagaimana Sri Sumarni dalam menerapkan pengarusutamaan gender terkait kebijakan yang Ia keluarkan serta pembelanjaan daerah sebagai salah satu tugas dan fungsi kepala daerah dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup (AHH) di Kabupaten Grobogan pada periode 2016 – 2021.

3. Pengarusutamaan Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi yang dilaksanakan secara rasional dan sistematis guna mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam sejumlah aspek kehidupan manusia dengan kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki kedalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari semua kebijakan dan program di berbagai bidang kehidupan dan pembangunan. Dalam Inpres tersebut seluruh jajaran eksekutif yakni, Gubernur, Bupati, Walikota harus

melakukan PUG dalam semua tahapan pembangunan.¹⁰

PUG adalah strategi untuk menjamin bahwa seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dari seluruh kebijakan, dan program dalam semua sektor pembangunan sudah memperhitungkan dimensi atau aspek gender yakni melihat laki-laki dan perempuan sebagai pelaku (subjek dan objek) yang setara dalam akses, partisipasi, kontrol atas pembangunan, dan memanfaatkan hasil pembangunan.

Tujuan pengarusutamaan gender yaitu memastikan apakah perempuan dan laki - laki:

- mendapatkan akses yang sama atas sumberdaya pembangunan.
- ikut serta yang sama dalam proses pembangunan. Termasuk proses pengambilan keputusan.
- memiliki kontrol yang sama atas sumberdaya pembangunan.
- mendapatkan manfaat yang sama dari hasil pembangunan.¹¹

¹⁰ Soeparman, Surjadi. (2006). Mengapa Gendermainstreaming Menjadi Aksi Nasional?. *Jurnal Perempuan Edisi 50*, Hlm.35.

¹¹ Wiasti, Ni Made.(2017). Mencermati Permasalahan Gender dan Pengarusutamaan Gender (PUG). *Dalam Sunari Penjor: Journal of Anthropology*, Hlm.37.

Penyelenggaraan pangarusutamaan gender meliputi baik pemenuhan kebutuhan praktis gender ataupun pemenuhan kebutuhan strategis gender. Kebutuhan praktis gender yaitu kebutuhan-kebutuhan jangka pendek dan berkaitan dengan perbaikan kondisi perempuan dan/atau laki-laki untuk menjalankan peran-peran sosial masing - masing, seperti perbaikan taraf kehidupan, perbaikan pelayanan kesehatan, penyediaan lapangan kerja, penyediaan air bersih, serta pemberantasan buta aksara. Kebutuhan strategis gender yaitu kebutuhan perempuan dan/atau laki-laki yang berhubungan dengan perubahan pola relasi gender dan perbaikan posisi perempuan dan/atau laki-laki, seperti perubahan di dalam pola pembagian peran, pembagian kerja, kekuasaan dan kontrol terhadap sumberdaya. Pemenuhan kebutuhan strategis ini bersifat jangka panjang, seperti perubahan hak hukum, penghapusan kekerasan dan deskriminasi di berbagai bidang kehidupan, persamaan upah untuk jenis pekerjaan yang sama, dan lainnya.¹²

¹² Ibid.Hlm. 37.

Berdasarkan buku Panduan Pelaksanaan Inpres No 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, yang dibuat oleh Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, menyatakan bahwa sejumlah kondisi awal yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan pengarusutamaan gender :

1. *Political will* dan kepemimpinan dari lembaga dan pemimpin eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Adanya kesadaran, kepekaan, dan respons, serta motivasi yang kuat guna mendukung terciptanya keadilan dan kesetaraan gender.
2. Adanya kerangka kebijakan yang secara jelas menyatakan komitmen pemerintah, provinsi, kabupaten/kota terhadap perwujudan kesetaraan dan keadilan gender.
3. Struktur dan mekanisme pemerintah, provinsi, kabupaten/kota yang mengintegrasikan perspektif gender.
4. Sistem Informasi dan data yang terpilah berdasarkan jenis kelamin.
5. Alat analisis : perencanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi.
6. Dorongan dari masyarakat madani kepada pemerintah.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam tiap tahap pembangunan khususnya dalam proses perencanaan dan perumusan kebijakan sangat dibutuhkan. Hal ini bertujuan agar kepentingan perempuan dan laki-laki dapat tertampung, sehingga keduanya dapat merasakan hasil pembangunan secara seimbang. Penelitian ini akan lebih menfokuskan diri kepada dua hal dari proses pengarusutamaan gender yaitu kebijakan yang dikeluarkan oleh kepala daerah dan belanja daerah.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Situs dari penelitian ini adalah para informan yang memiliki sumber informasi dalam kaitannya dengan kebijakan meningkatkan angka harapan hidup di Kabupaten Grobogan. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Bupati Grobogan, Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Kepala BAPPEDA Kabupaten Grobogan, dan Kepala Dinas DP3AKB Kabupaten Grobogan. Sumber data sekunder adalah data yang digunakan untuk menunjang data primer yaitu melalui penelitian pustaka, literatur, buku, majalah, surat kabar, dan arsip tertulis yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti dalam

penelitian ini. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: wawancara dan dokumentasi.

E. HASIL PENELITIAN

1. Kepemimpinan Bupati Sri Sumarni di Kabupaten Grobogan Periode 2016/2021

Sebagai seorang kepala daerah perempuan, Sri Sumarni memandang bahwa pada dasarnya perempuan memiliki derajat yang sama dengan laki-laki. Berdasarkan pandangannya ini, maka sudah terdapat nilai-nilai kesetaraan gender dari pemikiran Sri Sumarni sebagai seorang pemimpin perempuan. Bahkan, Sri Sumarni selaku Ketua Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) di Kabupaten Grobogan, mendorong agar perempuan berani untuk menjadi pemimpin.

*“Perempuan derajatnya sama dengan laki-laki. Maka kita harus bisa menempatkan diri sebagai perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Yang berani maju ke legislatif kemarin juga saya support, kita perempuan juga sama dengan laki-laki sebetulnya haknya”.*¹³

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa Bupati Sri Sumarni telah memiliki serta menerapkan prinsip kesetaraan gender. Hal ini menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender serta Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan terus meningkat. Penjelasan lebih lanjut terkait peningkatan Angka Harapan Hidup dijelaskan di sub bab selanjutnya yang terdiri dari dua bagian, yaitu kebijakan serta alokasi anggaran dalam meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan.

2. Strategi Meningkatkan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan.

a. Kebijakan

Dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup, Bupati Sri Sumarni mengatakan bahwa hal utama yang perlu diperbaiki adalah perbaikan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, hal yang dilakukan oleh Bupati Sri Sumarni adalah membuat program untuk membantu dan membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

¹³ Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00 WIB.

“Saya juga ada program, ini contohnya meningkatkan Angka Harapan Hidup, yaitu ada pembinaan-pembinaan untuk UMKM, itu contohnya disitu dan bagaimana kemiskinan ini juga harus diturunkan. Dan inilah program-program dari pemerintahan adalah pendidikan UMKM yang harus kita bina dan termasuk harus ada pendampingan dari kepala dinas masing-masing.”¹⁴

Selain memperbaiki perekonomian masyarakat, Bupati Sri Sumarni juga menaruh perhatian pada perbaikan aspek kesehatan masyarakat Kabupaten Grobogan. Hal ini terlihat dari dijadikannya perbaikan kualitas kesehatan masyarakat sebagai program prioritas setiap tahunnya. Namun, menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, wilayahnya sempat ditetapkan menjadi Kabupaten yang memiliki permasalahan di bidang kesehatan oleh Kementerian Kesehatan. Oleh karena itu, Bupati Sri Sumarni

berusaha untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan cara membuat rencana aksi.

Tidak hanya itu saja, Bupati Sri Sumarni juga membuat program Kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai program kependudukan. Program Kampung KB memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup.

Dari penjelasan diatas, dapat dikatakan bahwa tidak ada keterbaruan dari apa yang dilakukan oleh Bupati Sri Sumarni dengan kepala daerah sebelumnya. Namun, sebagai kepala daerah perempuan, Sri Sumarni menjadikan aspek kesehatan sebagai isu utama di era kepemimpinannya sehingga AHH Kabupaten Grobogan terus meningkat. Selain itu, Sri Sumarni sebagai kepala daerah perempuan juga tidak memiliki hambatan ketika menjalankan tugasnya. Bahkan, komunikasi yang baik dengan seluruh jajarannya serta organisasi masyarakat sipil dalam

¹⁴ Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00 WIB.

pengimplementasian kebijakan, khususnya terkait peningkatan AHH, dapat dikatakan berhasil sehingga AHH Kabupaten Grobogan terus meningkat.

b. Belanja Daerah

Menurut Sri Sumarni, ketersediaan anggaran menjadi kunci dalam hal implementasi kebijakan sehingga program-program peningkatan Angka Harapan Hidup dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, Bupati Sri Sumarni selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan terkait anggaran untuk memperbaiki kualitas kesehatan.

“Misalnya saya sudah punya program begini, langsung di koordinasikan dan dibahas oleh DPRD, yang punya palu DPRD, kalau memang dia setuju pasti digedog. Harus ada komunikasi dan apabila mengalokasikan anggaran, kalau ini mungkin kita harus menjelaskan misalnya anggaran kesehatan, untuk pengentasan kemiskinan, untuk membantu dana sosial dan

sebagainya. Ada pembahasan terus dibahas dan dibawa ke Banggar dan selanjutnya berarti sudah clear setuju digedog, proses bertahap.”¹⁵

F. PENUTUP

Kesimpulan

1. Sebagai kepala daerah perempuan, Bupati Sri Sumarni telah memiliki serta menerapkan prinsip kesetaraan gender. Hal ini menjadi dasar untuk menjelaskan mengapa Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pemberdayaan Gender, Indeks Pembangunan Gender serta Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan terus meningkat.
2. Kunci dari peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan adalah karena Bupati Sri Sumarni menjadikan permasalahan kesehatan menjadi prioritas yang harus diselesaikan.
3. Dalam upaya meningkatkan Angka Harapan Hidup, maka Bupati Sri Sumarni mengatakan bahwa hal utama yang perlu diperbaiki adalah perbaikan ekonomi masyarakat. Oleh

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00 WIB.

karena itu, hal yang dilakukan oleh Bupati Sri Sumarni adalah membuat program yang membantu dan membina para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

4. Dalam upaya memperbaiki kualitas kesehatan masyarakat, Bupati Sri Sumarni membangun beberapa infrastruktur, diantaranya seperti pembangunan dua rumah sakit baru di Wirosari dan Gubug. Selain itu, Bupati Sri Sumarni juga memastikan bahwa unit kesehatan di tingkat yang lebih kecil juga memiliki kualitas yang baik.
5. Selain membangun dan memperbaiki infrastruktur kesehatan, Bupati Sri Sumarni juga menggalakkan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas kesehatan yang berakibat pada peningkatan Angka Harapan Hidup, yaitu melalui kegiatan seperti Pendewasaan Usia Perkawinan, dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan reproduksi. Pelatihan Kader Bina Keluarga Balita, dalam kegiatannya ada 1000 Hari Pertama Kehidupan guna menekan angka stunting. Dan Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB). Sebagai kepala daerah perempuan, Bupati Sri

Sumarni menysar kepada perempuan. Hal ini efektif dan berjalan dengan baik sehingga Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan terus meningkat.

6. Bupati Sri Sumarni juga membuat program Kampung KB (Keluarga Berencana) sebagai program kependudukan. Program Kampung KB memiliki tujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara dalam mewujudkan keluarga kecil berkualitas dan mendukung peningkatan Angka Harapan Hidup.
7. Bupati Sri Sumarni juga memberikan perhatian khusus terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan. Oleh karena itu, dibawah kepemimpinan Bupati Sri Sumarni, pemerintah Kabupaten Grobogan membuka pelaporan terkait kasus kekerasan terhadap perempuan yang nantinya akan diberikan bantuan berupa pendampingan.
8. Tidak ada pembaharuan dari apa yang dilakukan oleh Bupati Sri Sumarni. Namun, secara implementasi kebijakan, Bupati Sri Sumarni memang memberikan perhatian lebih terhadap

permasalahan tersebut. Hal ini dilakukan dengan cara membuat komitmen dengan seluruh jajarannya sehingga implementasi kebijakan dapat dilakukan secara simultan. Selain itu, Bupati Sri Sumarni juga merangkul beberapa organisasi masyarakat sipil yang memiliki spesialisasi terkait kesehatan masyarakat.

9. Tidak ada hambatan bagi seorang kepala daerah perempuan. Bahkan, penelitian ini memperlihatkan bahwa kepala daerah perempuan juga memiliki kemampuan manajerial yang baik sehingga program-program peningkatan Angka Harapan Hidup dapat terimplementasi dengan baik.
10. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat Kabupaten Grobogan menjadi prioritas di bawah kepemimpinan Sri Sumarni. Hal ini juga tercermin dari meningkatnya anggaran di bidang kesehatan setiap tahunnya
11. Terkait anggaran, Bupati Sri Sumarni juga tidak hanya memfokuskan anggaran untuk pembangunan infrastruktur, namun juga memberikan dana kepada

masyarakat kurang mampu dalam hal pembiayaan iuran BPJS Kesehatan. Hal ini juga merupakan salah satu faktor peningkatan Angka Harapan Hidup di Kabupaten Grobogan.

12. Ketersediaan anggaran menjadi kunci dalam hal pengimplementasikan kebijakan sehingga program-program peningkatan Angka Harapan Hidup dapat terlaksana dengan baik dan maksimal. Oleh karena itu, Bupati Sri Sumarni selalu melakukan koordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Grobogan terkait anggaran untuk memperbaiki kualitas kesehatan.

Saran

Meninjau dari yang sudah dibahas pada Bab III, berikut ini adalah sejumlah saran yang dapat diberikan oleh peneliti:

1. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa kepala daerah yang memiliki perspektif kesetaraan gender, serta mengaplikasikan Pengarusutamaan Gender dengan baik, berhasil meningkatkan Angka Harapan Hidup. Oleh karena itu, penting bagi kepala daerah untuk

mengoptimalkan Pengarusutamaan Gender dalam setiap kebijakan.

2. Kepala Daerah juga perlu untuk merangkul seluruh masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam proses peningkatan Angka Harapan Hidup.
3. Penelitian ini juga memiliki temuan bahwa tidak ada kebijakan baru di era kepemimpinan Sri Sumarni. Hanya saja, Bupati Sri Sumarni berhasil mengoptimalkan program yang ada dengan cara menjadikan permasalahan kesehatan sebagai prioritas. Oleh karena itu, penting bagi setiap dinas di Kabupaten Grobogan untuk mengevaluasi serta mengoptimalkan kebijakan yang ada sehingga berdampak pada peningkatan Angka Harapan Hidup.

DAFTAR PUSTAKA

- Dokumen RPJMD Kabupaten Grobogan Tahun 2016-2021, Bab II, Hlm.22.
- Nugroho, Riant D. (2008). Gender dan Strategi Pengarusutamaannya di Indonesia. Yogyakarta : Pustaka Pelajar. Hlm.2.
- Pratama, Youngky Andre., Iwan Rachmat Soetijono, dan Gautama Budi Arundhati.(2013). Hak-Hak Politik Perempuan dalam Lembaga Legislatif dalam Menghadapi Pemilu 2014 di Indonesia Ditinjau dari Konsep Hak Asasi Manusia. *Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*. Universitas Jember. Hlm.2.
- Philips, Anne. (1991). *Engendering Democracy*. Cambridge : Polity Press. Hlm.63.
- Sasmita, Jumiati., dan Said As'ad Raihan. (2014). Kepemimpinan Pria dan Wanita, Towards a News Indonesia Business Architecture. Hlm.229.
- Soeparman, Surjadi. (2006). Mengapa Gendermainstreaming Menjadi Aksi Nasional?. *Jurnal Perempuan Edisi 50*, Hlm.35.
- Anthropology*, Hlm.37.
- Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00 WIB.
- Wawancara dengan Ibu Sri Sumarni, Bupati Grobogan Periode 2016-2021 pada

tanggal 5 Mei 2021 pukul 13.00
WIB.

Yulianti, Reny., Dedy Dwi Putra, dan Paulus
Diki Takanjanji. (2018). Women
Leadership : Telaah Kapasitas
Perempuan Sebagai Pemimpin.
*Jurnal Politik dan Sosial
Masyarakat, Vol.10, No.2.* Hlm.24.

Wiasti, Ni Made.(2017). Mencermati
Permasalahan Gender dan
Pengarusutamaan Gender (PUG).
*Dalam Sunari Penjor: Journal of
Anthropology, Hlm.37.*